

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Oleh :

Miswati Gultom¹, Anggiat Sinurat², Darwin Damanik³

miswati.gultom3009@gmail.com, darwin.damanik@gmail.com

Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja di Kota Pematangsiantar; 1) Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, 2) Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, 3) Rasio Pajak, 4) Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini termasuk menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar adalah daerah otonom yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dieksploitasi sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD dari pajak yang memungkinkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar sebagai salah satu pemerintah otonom terus berupaya menggerakkan berbagai potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi dapat berperan serta dan berpartisipasi aktif menggerakkan perekonomian sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar. Dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom, daerah harus mematuhi peraturan yang ada.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas Penerimaan, Rasio Pajak, Efisiensi Penerimaan*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, penghasilan dari perusahaan BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah.

Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dikelola dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing. Termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih tahu potensi yang dimilikinya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan suatu daerah untuk melakukan otonomi daerah tidak hanya terbatas pada kemampuan pada bidang legislatif saja, tetapi juga harus mampu melakukan otonomi daerah dibidang eksekutif. Sebagai daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan perundang - undangan sendiri, keuangan sendiri serta pegawai-pegawai sendiri.

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah

kepada masyarakat luas. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah..

Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi. Dimana kebijakan pembangunan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah. Otonomi daerah tidak serta merta mendatangkan berkah bagi pemerintah daerah.

Banyak persoalan terutama menyangkut aspek keuangan yang kemudian timbul seiring dengan bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tantangan yang juga dihadapi dalam mencapai cita-cita otonomi daerah juga tidak dapat dikatakan mudah.

Wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan suatu tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi, yang dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Daerah perkotaan terdapat berbagai kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari Kota Pematangsiantar yang merupakan kota terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Kota Pematangsiantar digunakan sebagai pusat jasa, perdagangan, serta pusat perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas ekonomi suatu negara itu mengalami perkembangan atau tidak maka diperlukan suatu data yang akan menunjukkan mengenai kegiatan perekonomian negara. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi, salah satunya yang penting adalah data mengenai pendapatan nasional.

Dalam analisis makroekonomi selalu digunakan istilah "Pendapatan nasional" atau "*National Income* (NI)". Biasanya istilah pendapatan nasional untuk menyatakan jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan nasional (*national income*) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.

Pendapatan dibagi lagi menjadi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja dibagikan menjadi belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Sedangkan pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Pendapatan asli daerah merupakan hal penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu dan menjadi hak daerah.

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- Pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan,
- Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan PAD tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah

- Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik ditingkat

provinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota.

- Pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Hal dikarenakan retribusi memiliki sifat iuran berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan daerah langsung kepada masyarakat yang mendapat manfaat.
- Pemerintah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan PAD yang telah diatur undang-undang
- Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan.
- Perbaikan jasa layanan dan peningkatan fasilitas publik akan membuat wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Penelitian dilakukan di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Data yang diambil melalui penelitian itu adalah data yang empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. (Sugiyono,2017:2)

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai kinerja PAD di Kota Pematangsiantar

1. Unit Analisis

Unit analisis adalah entitas yang mbingkai apa yang sedang dianalisis dalam suatu penelitian, atau sumber informasi mengenai variable yang akan diolah pada tahap analisis data.

- Laju pertumbuhan PAD Kota Pematangsiantar
- Efektifitas penerimaan PAD Kota Pematangsiantar
- Rasio pajak Kota Pematangsiantar
- Efisiensi PAD Kota Pematangsiantar

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Karena data

kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.

1. Cara Menghitung Pertumbuhan PAD :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt} - \text{PADt} - 1}{\text{PADt} - 1} \times 100\%$$

Dimana:

- PAD = Pendapatan asli daerah
- PADt = Pendapatan asli daerah tahun sekarang
- PADt-1 = Pendapatan asli daerah tahun sebelumnya

2. Efektifitas penerimaan PAD

Kinerja pemerintah kota pematangsiantar dalam melakukan pemungutan PAD dapat dikategorikan sangat efektif apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang ditetapkan. Rasio efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Tingkat Efektifitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

3. Rasio pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak atau tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak.

$$\text{Tax ratio} = \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Tax Ratio

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

4. Efisiensi penerimaan PAD

Efisiensi mengandung beberapa pengertian antaralain; pertama, efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input-output). Kedua, efisiensi pada sector pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Total pengeluaran}}{\text{Total penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Efisiensi PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

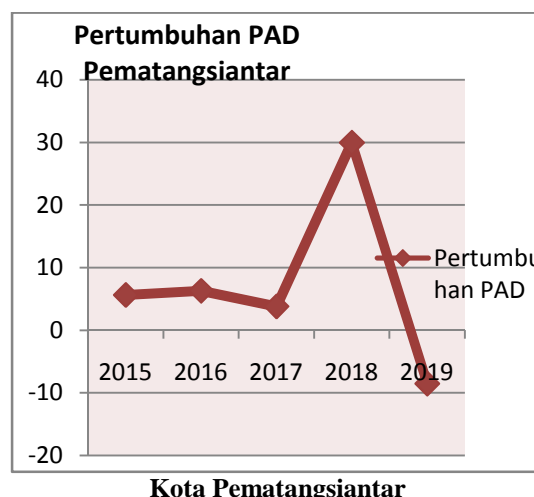
Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan terjadi setiap tahunnya. Karena dengan meningkatnya pertumbuhan dapat memberi pengaruh positif terhadap perekonomian daerah dan sekaligus menjadi langkah untuk kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan Dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Penerimaan PAD	Laju pertumbuhan PAD
2015	Rp. 95.557.865.280	5,63%
2016	Rp. 101.581.324.159.	6,30%
2017	Rp. 105.445.993.204	3,80%
2018	Rp. 137.052.839.192	29,97%
2019	Rp.125.341.747.501	-8,54%

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah



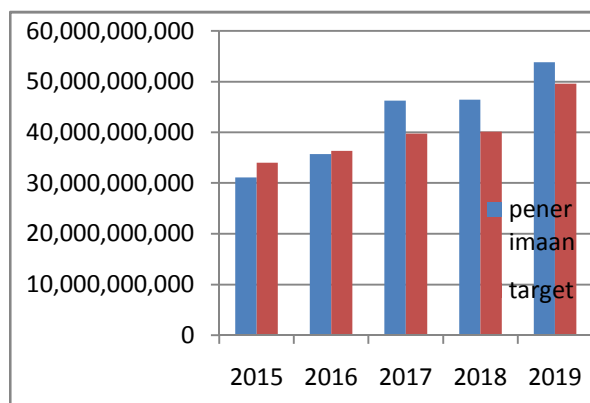
2. Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas pendapatan daerah asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah melalui

targer pajak daerah yang di targetkan berdasarkan potensi daerah.

Realisasi Dan Target Pajak Daerah Kota Pematangsiantar, Serta Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi pajak	Target pajak	Efektifitas	Kriteria
2015	Rp.31.105.131.475	Rp.34.000.000.000	91%	Efektif
2016	Rp.35.735.129.177	Rp.36.330.000.000	98%	Efektif
2017	Rp.46.253.296.639	Rp.39.730.000.000	116%	Sangat efektif
2018	Rp.46.460.214.440	Rp.40.100.000.000	115%	Sangat efektif



Tahun	Realisasi pajak	Target pajak	Efektifitas	Kriteria
2019	Rp.53.802.273.943	Rp.49.615.000.000	108%	Sangat efektif

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

Grafik Realisasi Dari Target Pajak Daerah Pematangsiantar

3. Rasio Pajak

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap PDRB dikalikan 100. Penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan PAD maka nilai pajak yang dihasilkan haruslah tinggi agar penerimaan PAD menjadi meningkat.

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PDRB, Serta Rasio Pajak Kota Pematangsiantar, Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Penerimaan	PDRB	Rasio pajak	Kriteria
2015	Rp.31.105.131.470	Rp.10.566.328.260	294%	Sangat efektif
2016	Rp.35.735.129.177	Rp.11.579.290.410	308%	Sangat efektif
2017	Rp.46.253.296.639	Rp.12.443.955.440	371%	Sangat efektif
2018	Rp.46.460.214.440	Rp.13.176.710.840	352%	Sangat efektif
2019	Rp.53.802.273.943	Rp.13.933.249.490	386%	Sangat efektif

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

4. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi adalah hasil terbaik dari hasil perbandingan antara usaha yang dikeluarkan

dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Semakin rendah hasil perbandingan antara nilai input dan output berarti tingkat efisiensi semakin tinggi.

Pengeluaran Dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Pengeluaran	Penerimaan	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp.884.146.657.650	Rp.891.378.886.500	99,1%	Kurang efisien
2016	Rp. 940.116.286.851	Rp.1.082.763.883.423	86%	Cukup efisien
2017	Rp. 934.471.598.872	Rp.869.993.438.966	107%	Tidak efisien
2018	Rp.1.810.109.725.818	Rp.2.017.670.121.282	89%	Cukup efisien
2019	Rp.935.104.715.832	Rp.1.005.302.117.110	92%	Kurang efisien
Rata-rata	Rp.1.100.789.797.0054	Rp.1.401.164.577.511	94,62%	Kurang efisien

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar diatas yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019. PAD Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan sebesar 5,63% dari tahun 2014 dengan penerimaan PAD Rp.95.557.865.280, dilanjutkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,30% dengan penerimaan sebesar Rp.101.581.324.159. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2017 sebesar 3,80% dengan jumlah penerimaan Rp.105.445.993.204. Pada tahun 2018 PAD kota pematangsiantar mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 29,97% dengan jumlah penerimaan Rp.137.052.839.192. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 21,43% menjadi 8,54% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp.125.341.747.501.
2. Bahwa efektifitas pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar selama 5 yang diteliti dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019. Tingkat efektifitas sudah melampaui 100% dan dapat dikatakan sangat efektif pada tahun anggaran 2017 sampai 2019, hal ini disebabkan karena realisasi lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah Pematangsiantar. Pada tahun 2017 yang ditargetkan Rp.39.730.000.000 hanya dapat direalisasikan menjadi Rp.46.253.296.639. Pada tahun 2018 yang ditargetkan Rp.40.100.000.000 dapat direalisasikan Rp.46.460.214.440. Pada tahun 2019 ditargetkan Rp.49.615.000.000. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 tingkat efektifitasnya sekitar 91% dimana target tidak dapat direalisasikan dengan target Rp.34.000.000.000 yang hanya dapat direalisasikan Rp.31.105.131.475 dan tahun

anggaran 2016 tingkat efektifitasnya sekitar 98% dimana target tidak dapat direalisasikan dengan target Rp.34.000.000.000 yang hanya dapat direalisasikan Rp.35.735.129.177 dapat dikatakan penerimaan pendapatan asli daerah efektif.

3. Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan tax ratio yang dihasilkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015-2019. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan pajak terhadap penerimaan PAD Kota Pematangsiantar sudah baik, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kota Pematangsiantar dapat berperan aktif dalam mewujudkan perumbuhan dan pembangunan ekonomi kota Adapun rasio pajak Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2015, rasio pajak Kota Pematangsiantar sebesar 294% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.31.105.131.470 dengan pdrb Rp.10.566.328.260. Jika yang dihasilkan lebih dari 100% maka dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun anggaran 2016, rasio pajak Kota Pematangsiantar sebesar 308% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.35.735.129.177 dengan PDRB Rp.11.579.290.410. Pada tahun anggaran 2017, rasio pajak Kota Pematangsiantar sebesar 371% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.46.253.296.639 dengan PDRB Rp.12.443.955.440 . Pada tahun anggaran 2018, rasio pajak Kota Pematangsiantar sebesar 352% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.46.460.214.440 dengan PDRB Rp.13.176.710.840. Pada tahun anggaran 2019, rasio pajak Kota Pematangsiantar sebesar 386% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.53.802.273.943 dengan PDRB Rp.13.933.249,490.
4. Efisiensi adalah hasil terbaik dari hasil perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Semakin rendah hasil perbandingan antara nilai input dan output berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2015-2019. Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar pada anggaran tahun 2015 sebesar 99,1% mencerminkan kurang efisien karena diantara 90-100% Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah anggaran tahun 2016 sebesar 86% mencerminkan cukup efisien karena diantara 80-90% dari pengelolan PAD. Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah anggaran tahun 2017 sebesar 107% mencerminkan tidak efisien karena diatas 100% dari pengelolaan PAD. Tahun 2018 sebesar 89% mencerminkan cukup efisien karena diantara 80-90% dari pengelolan PAD. Tahun 2019 sebesar 92% mencerminkan kurang efisien

mencerminkan karena diantara 90-100 dari pengelolaan PAD.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar, maka penulis mencoba memberikan masukan atau saran. Semoga masukan atau saran ini dapat berguna untuk meningkatkan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

1. Diharapkan kepada Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan di pemerintah Kota Pematangsiantar, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah.
2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Karena pajak merupakan salah satu pemberi kontribusi kepada pemerintah daerah Kota Pematangsiantar.
3. Untuk meningkatkan efektifitas pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar diharapkan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pengawasan agar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat disesuaikan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
4. Sedangkan untuk efisiensi pendapatan asli daerah sebaiknya pemerintah Kota Pematangsiantar dapat meminimalisir pengeluaran sesuai dengan penerimaan yang didapat agar tingkat efisiensi sangat baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama, sebaiknya menambah jumlah tahun penelitian agar dapat membandingkan Jumlah minimal data untuk penelitian sederhana yang baik sebanyak 10 tahun dan Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota pematangsiantar.

Daftar Pustaka

- Agung, Anak. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variable Pemodulasi*. Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unviersitas Brawijaya
- Ananda, Ya'qud. 2017. *Konsep Penyusunan Anggaran Public Daerah*. Malang: Intrans Publising
- Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Depok: Ragrafindo Persada
- Ayu, Sri. 2017. *Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Piaman Dari Tahun 2011-2017*.

- Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas
Andalas
- Calen, 2018. *Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar*. Jurnal Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Bisnis Indonesia
- Endang, Sri dkk. 2016. *Pengantar Ekonomi Makro*. Medan: Perdana Publising
- Juliastani dan Wardana. 2012. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana Bali
- Salam, Rudi. 2016. *Politik Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Daerah*. Medan: Perdana Publising
- Sri, Ani. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiscal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suparmoko, M. 2016. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Faqihudin, M. 2010. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Public*. Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Pancasakti Tegal